

g  
2/3-2024

**KETEPATAN KEBIJAKAN PEMBATAAN LALU LINTAS  
DENGAN SISTEM GANJIL GENAP DI PROVINSI DKI JAKARTA**

Nida Maharani Putri, Tri Yuniningsih

Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

---

**ABSTRACT**

*Congestion and air pollution are crucial problems faced by DKI Jakarta as a metropolitan city with a high level of mobility. One of the policies implemented to address this problem is the Odd-Even system, which aims to reduce vehicle volumes and reduce pollutant emissions. However, even though it has been in place for almost seven years, this policy still faces various challenges in its implementation. Problems actually arise as the policy progresses, namely an increase in used car sales and the use of fake vehicle plates so that this policy does not run well. The purpose of this study is to Analyze the Implementation of the Odd-Even Policy in DKI Jakarta Province and Analyze the determinants of the inaccuracy of the Odd-Even Policy in DKI Jakarta Province. The method used is qualitative descriptive research. Data collection was carried out through observational studies, interviews, and documentation. The technique used to determine the informant is purposive sampling. The results of the study show that the implementation of the Traffic Restriction Policy with the Odd-Even System in DKI Jakarta Province which is analyzed through the right process and right target aspects is not good, while from the right policy, right implementation and right environment can be said to be good. In addition, it was also found that factors that are considered to hinder this policy are resource factors and environmental, economic, and political factors. Recommendations that can be given are expanding the implementation of E-TLE, continuing to optimize public transportation, increasing the allocation of funds to increase the number of air monitoring stations and providing real-time data-based evaluations.*

**Keywords: Implementation Accuracy, Traffic Restrictions, Odd-Even System**

## ABSTRAK

Kemacetan dan polusi udara merupakan permasalahan krusial yang dihadapi DKI Jakarta sebagai kota metropolitan dengan tingkat mobilitas yang tinggi. Salah satu kebijakan yang diterapkan untuk mengatasi masalah ini adalah sistem Ganjil Genap, yang bertujuan mengurangi volume kendaraan dan menekan emisi polutan. Namun, meskipun telah diberlakukan selama hampir tujuh tahun, kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Masalah justru muncul seiring berjalannya kebijakan yaitu peningkatan penjualan mobil bekas dan pemakaian pelat kendaraan palsu sehingga kebijakan ini tidak berjalan dengan baik. Tujuan penelitian ini yaitu untuk Menganalisis Implementasi Kebijakan Ganjil Genap Di Provinsi DKI Jakarta dan Menganalisis faktor penentu ketidaktepatan dari Kebijakan Ganjil Genap di Provinsi DKI Jakarta. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik yang digunakan untuk menentukan informan adalah teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil Genap di Provinsi DKI Jakarta yang dianalisis melalui aspek tepat proses dan tepat target belum baik, sedangkan dari aspek tepat kebijakan, tepat pelaksana dan tepat lingkungan dapat dikatakan sudah baik. Selain itu, ditemukan pula faktor yang dianggap menghambat kebijakan ini yaitu faktor sumber daya dan faktor Lingkungan, ekonomi, dan Politik. Rekomendasi yang dapat diberikan yaitu memperluas penerapan E-TLE, terus mengoptimalkan transportasi umum, penambahan alokasi dana untuk menambah jumlah stasiun pemantau udara dan memberikan evaluasi berbasis data *real-time*.

**Kata Kunci: Ketepatan Implementasi, Pembatasan Lalu Lintas, Sistem Ganjil Genap**



**Tabel 1 Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota se DKI Jakarta**

Wilayah	Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota se DKI Jakarta (jiwa)		
	2021	2022	2023
Kepulauan Seribu	27.996	28.262	28.523
Jakarta Selatan	2.232.442	2.234.262	2.235.606
Jakarta Timur	3.051.866	3.066.074	3.079.618
Jakarta Pusat	1.057.465	1.053.482	1.049.314
Jakarta Barat	2.446.687	2.458.707	2.470.054
Jakarta Utara	1.788.981	1.799.220	1.808.985
DKI Jakarta	10.605.437	10.640.007	10.672.100

Sumber: BPS, 2024.

Sebagai kota dengan jumlah penduduk yang padat dan tingkat pergerakan yang tinggi, DKI Jakarta menghadapi tantangan besar dalam menjaga kualitas udara. Dengan populasi yang melebihi 10 juta jiwa serta mobilitas harian yang sangat dinamis, jumlah kendaraan bermotor di jalan terus bertambah secara signifikan.

**Gambar 3 Grafik Sumber Utama Pencemaran Udara Provinsi DKI Jakarta**



Sumber: BPS DKI Jakarta, 2019

Sumber utama pencemaran udara yang ada di Jakarta adalah transportasi darat yang mana menyumbang sebanyak 75% dari total emisi gas buang. Hal ini menunjukkan bahwa kendaraan bermotor yang beroperasi di jalanan ibu kota memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas udara, dengan emisi gas buang menjadi penyumbang terbesar terhadap polusi udara di wilayah tersebut.

**Tabel 2 Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota se DKI Jakarta**

Jenis Kendaraan	Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis		
	2020	2021	2022
Mobil Pemanggang	3.365.467	3.544.491	3.766.059
Bus	35.266	36.339	37.180
Truk	679.141.380	713.059	748.394
Sepeda Motor	16.141.380	16.711.638	17.304.447
Jumlah	20.221.821	21.005.527	21.856.081

Jumlah kendaraan bermotor yang notabene menjadi penyumbang polusi udara terbesar terus mengalami tren pertumbuhan setiap tahunnya. Pertumbuhan kendaraan bermotor di Jakarta dalam 10 tahun terakhir mencapai rata-rata 5,8% per tahun dan diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan penambahan penduduk.

Pemerintah DKI Jakarta terus berupaya mencari solusi untuk mengatasi masalah polusi udara yang disebabkan oleh kendaraan bermotor. Meskipun belum sepenuhnya berhasil, berbagai upaya yang telah dilakukan menunjukkan adanya komitmen untuk menciptakan udara Jakarta yang lebih bersih. Namun hasilnya belum efektif mengatasi polusi udara di DKI Jakarta. Kajian perencanaan transportasi DKI Jakarta menyebutkan bahwa penyediaan infrastruktur transportasi saja belum cukup untuk menekan jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta. Dua tantangan utama dalam pengembangan transportasi di Jakarta adalah arus urbanisasi yang terus meningkat dan keterbatasan sumber daya.

Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan untuk membatasi volume kendaraan, kebijakan ganjil-genap di Jakarta mengalami transformasi dari sekadar pengendalian lalu lintas menjadi upaya yang lebih serius untuk mengatasi masalah kualitas udara. Peraturan Gubernur No. 164 Tahun 2016 menjadi tonggak awal penerapan ganjil-genap, yang kemudian terus disempurnakan melalui Instruksi Gubernur No. 66 Tahun 2019 dan Peraturan Gubernur No. 88 Tahun 2019. Saat ini, 26 ruas jalan di Jakarta pembatasan ganjil-genap pada jam-jam sibuk. Meskipun kebijakan ganjil genap telah diterapkan dengan harapan untuk mengurangi volume kendaraan di DKI Jakarta, namun kenyataannya, belum sepenuhnya berhasil dalam mencapai tujuan tersebut. Masih terdapat sejumlah kendaraan yang beroperasi di jalan-jalan ibukota pada setiap harinya, terutama kendaraan pribadi yang jumlahnya masih cukup besar.

Dengan tingginya jumlah kendaraan yang beredar di jalan, terutama pada jam-jam sibuk, kebijakan ganjil genap belum mampu sepenuhnya mengurangi kemacetan lalu lintas.

Penggunaan pelat nomor palsu sebagai modus pelanggaran kebijakan ganjil-genap di Jakarta tidak hanya merugikan pemerintah, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Hal ini menyebabkan kebijakan tersebut tidak berjalan efektif dan tujuan untuk

mengurangi kemacetan dan emisi gas buang tidak tercapai. Beberapa masyarakat memilih untuk membuat dan menggunakan pelat nomor palsu sebagai cara untuk mengelabui petugas dan sistem pemantauan yang ada. Penggunaan pelat nomor palsu mempersulit penegakan hukum, karena petugas mengalami kesulitan dalam membedakan antara kendaraan yang sah dan yang tidak sah di jalanan.

Fenomena ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum yang perlu diperbaiki. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya yang lebih ketat dalam pengawasan dan penindakan, termasuk penggunaan teknologi yang lebih canggih untuk mendeteksi pelat nomor palsu. Edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi kebijakan ganjil genap dan dampak negatif dari pelanggaran juga perlu ditingkatkan.

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini perlu dilakukan penelitian terkait analisis implementasi kebijakan ganjil genap pada penurunan volume kendaraan di DKI Jakarta dan faktor penentu ketidaktepatan dari kebijakan tersebut. Sehingga pertanyaan penelitian yang akan dijawab adalah mengapa implementasi kebijakan ganjil genap belum berjalan dengan baik dalam menurunkan mengurangi volume kendaraan dan mengurangi emisi gas buang kendaraan di Provinsi DKI Jakarta.

Penelitian ini menggunakan teori Ketepatan implementasi menurut Nugroho (2021), yang mencakup 5 tepat yaitu, tepat kebijakan, tepat pelaksana, tepat proses, tepat lingkungan, dan tepat target serta teori model implementasi menurut Donald Van Metter dan Carl Van Horn yang digunakan untuk menentukan ketidaktepatan kebijakan yang mencakup standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antarorganisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik

Berdasarkan kajian singkat terhadap penelitian terdahulu dengan fokus yang serupa, beberapa hasil penelitian memiliki relevansi dengan penelitian ini. Andre Alparis Hasiholan (2022) menganalisis Implementasi Kebijakan Pembatasan Lalu Lintas Dengan Sistem Ganjil Genap Di Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat kendala yang menghambat serta memunculkan tantangan baru. Beberapa di antaranya adalah masih maraknya pelanggaran, belum adanya penurunan signifikan dalam tingkat kemacetan, terutama saat musim hujan, serta bertambahnya pergeseran titik kemacetan dari jalan utama ke jalur alternatif.

Penelitian lain oleh Isye Shinta Rahmawati (2021) menyoroti Implementasi Kebijakan Sistem Ganjil Genap di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Penerapan kebijakan sistem ganjil genap di DKI Jakarta sudah berjalan dengan cukup efektif, tetapi masih ada aspek yang perlu dievaluasi dan diperbaiki guna mencapai hasil yang lebih optimal.

Penelitian ini memberikan kebaruan melalui fokus pada pendekatan yang menggunakan dua teori secara bersamaan yaitu teori ketepatan implementasi dan model implementasi kebijakan Van Metter dan Carl Van Horn yang digunakan untuk mengalisis ketepatan kebijakan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap di Provinsi DKI Jakarta.

Uraian latar belakang yang telah dijelaskan menimbulkan ketertarikan peneliti untuk menggali lebih dalam mengenai ketepatan implementasi kebijakan pembatasan lalu lintas dengan sistem Ganjil Genap di DKI Jakarta. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai ketepatan kebijakan tersebut serta solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan kemacetan dan polusi udara di Jakarta.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitiin pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran yaitu tentang bagaimana implementasi kebijakan publik tersebut seperti dengan apa adanya di lapangan dan apa faktor ketidaktepatan dalam implementasi. Dalam hal ini bagaimana sesungguhnya gambaran proses implementasi kebijakan ganjil genap di Provinsi DKI Jakarta secara kualitatif.

Situs penelitian adalah tempat di mana peneliti melakukan kegiatan untuk mengumpulkan data yaitu di Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Alasan pemilihan DKI Jakarta sebagai lokasi penelitian adalah karena statusnya sebagai ibukota Indonesia yang menjadi percontohan utama dalam pembangunan. Selain itu, reputasi Jakarta sebagai salah satu kota dengan tingkat kemacetan lalu lintas tertinggi di Indonesia juga menjadi faktor penentu.

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk menentukan informan adalah teknik *purposive sampling*. Pada penelitian ini, teknik penentuan informan yang dilakukan oleh peneliti adalah teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2012:54) *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala

Seksi Teknis Manajemen Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi lapangan dan dokumentasi. Tahapan yang digunakan sebagai acuan peneliti berdasarkan Miles, Huberman, dan Saldana (2014: 12-14) yaitu, kondensasi data, penyajian data, dan verifikasi data. Pada penelitian ini menggunakan 4 cara uji keabsahan menurut Sugiyono (2010:458) yaitu uji kredibilitas, *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (objektivitas).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Ketepatan Kebijakan Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil Genap di DKI Jakarta**

Kebijakan pembatasan lalu lintas dengan sistem Ganjil Genap diterapkan di DKI Jakarta sebagai upaya mengurangi kemacetan dan polusi udara. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi ketepatan implementasi kebijakan tersebut berdasarkan teori ketepatan implementasi menurut Nugroho, yang mencakup lima aspek utama: tepat kebijakan, tepat pelaksana, tepat proses, tepat lingkungan, dan tepat target.

#### **A. Tepat Kebijakan**

Tepat kebijakan dalam konteks kebijakan ganjil genap mengacu pada sejauh mana kebijakan ini mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif

dan efisien. Tepat kebijakan berarti aturan ganjil genap berhasil mengurangi volume kendaraan secara signifikan di ruas jalan tertentu, menekan tingkat kemacetan, dan memperbaiki kualitas udara sesuai dengan target yang diharapkan. Hal ini juga mencakup kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan masyarakat, seperti ketersediaan transportasi umum yang memadai untuk mendukung peralihan dari kendaraan pribadi. Ketepatan implementasi kebijakan apabila dilihat dari relevansi masalah sudah sesuai dan kejelasan kebijakan sudah terdefinisi dengan baik, sehingga dalam hal ini tepat kebijakan implementasi kebijakan ganjil genap dapat dikatakan sudah tepat.

### **B. Tepat Pelaksana**

Tepat pelaksana merupakan kunci keberhasilan dalam implementasi kebijakan, di mana pihak yang melaksanakan kebijakan harus memiliki kompetensi, kapasitas, dan tanggung jawab yang sesuai. Dalam kebijakan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap di DKI Jakarta, pelaksanaan kebijakan ini melibatkan Dinas Perhubungan dan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya sebagai pelaksana utama.

Dinas perhubungan Provinsi DKI Jakarta bertanggungjawab sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan ganjil genap sedangkan Ditlantas Polda Metro Jaya bertugas sebagai pengawas kebijakan dan dinas lingkungan hidup berperan sebagai pemantau kebijakan. Dalam hal ini pelaksana atau implementor dalam

Kebijakan Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil Genap sudah sesuai dengan tupoksinya masing-masing, Semua pihak yang terlibat sudah memahami tugas dan fungsinya dengan baik, antarorganisasi juga saling berkoodinasi dan bekerja sama dengan baik.

### **C. Tepat Proses**

Tepat proses adalah sesuatu yang mencakup pelaksanaan kebijakan yang sistematis dan terstruktur. Setiap tahap dari perencanaan hingga evaluasi harus dilakukan dengan baik. Tepat proses merupakan elemen penting dalam implementasi kebijakan untuk memastikan setiap tahap pelaksanaan berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Pada saat awal mula diberlakukannya kebijakan ganjil genap, masyarakat mematuhi kebijakan dengan baik. Prosedur yang jelas dan koordinasi pelaksanaan sudah berjalan dengan baik. Namun konsistensi pelaksanaan dalam hal ini masyarakat belum sepenuhnya mendukung keberhasilan implementasi kebijakan dikarenakan seiring berjalannya waktu, efeknya mulai berkurang karena banyaknya pengendara yang mencari cara untuk menghindari aturan.

### **D. Tepat Lingkungan**

Tepat lingkungan adalah kesesuaian kebijakan dengan konteks sosial, ekonomi, dan politik di mana kebijakan tersebut diterapkan. Lingkungan yang mendukung sangat penting untuk keberhasilan



kebijakan. Dalam kasus kebijakan ganjil genap. Tepat lingkungan dalam implementasi kebijakan berarti kebijakan diterapkan pada situasi, kondisi, dan tempat yang sesuai sehingga dapat memberikan dampak yang optimal.

Kebijakan ini belum tepat apabila dilihat dari indikator kondisi sosial masyarakat, hal ini dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan, sedangkan dari kedua indikator lainnya, dukungan politik pemerintah dan kesiapan infrastruktur sudah dapat dikatakan cukup baik

### E. Tepat Target

Tepat target adalah salah satu prinsip dalam pelaksanaan kebijakan publik yang menekankan bahwa kebijakan harus menyasar kelompok atau individu yang menjadi sasaran utama sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Kebijakan ganjil genap yang bertujuan untuk mengurangi kemacetan dan emisi gas buang ternyata mendorong tren baru di kalangan masyarakat, yaitu pembelian mobil bekas dengan pelat nomor berbeda. Fenomena ini muncul sebagai respons masyarakat untuk tetap dapat menggunakan kendaraan pribadi tanpa terhambat oleh aturan ganjil genap. Selain itu tantangan yang dihadapi kebijakan ganjil genap adalah muncul fenomena lain yang semakin memperumit upaya pengendalian lalu lintas dan emisi. Beberapa masyarakat, alih-alih mencari solusi yang sesuai aturan, justru

memilih jalan pintas dengan menggunakan pelat nomor palsu untuk menghindari pemberlakuan kebijakan ini. Praktik ilegal ini tidak hanya merugikan secara hukum, tetapi juga mengurangi efektivitas pengawasan kebijakan ganjil genap, terutama di ruas-ruas jalan yang diawasi oleh sistem E-TLE.

**Tabel 3 Analisis Ketepatan Implementasi menurut Nugroho (2021) dalam Kebijakan Ganjil Genap**

No	Ketepatan Implementasi Kebijakan Ganjil Genap	Keterangan
1	Tepat Kebijakan	Sudah tepat
2	Tepat Pelaksana	Sudah tepat
3	Tepat Proses	Belum tepat proses, dikarenakan kebijakan berjalan efektif hanya pada awal pemberlakuan saja, masyarakat banyak yang melanggar peraturan.
4	Tepat Lingkungan	Belum tepat lingkungan, dikarenakan: Dukungan sosial : masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan ganjil genap. Dukungan politik : sudah tepat Kesiapan infrastruktur : sudah tepat
5	Tepat Target	Belum tepat target untuk menurunkan volume kendaraan, dikarenakan anomali masyarakat meningkat terhadap pembelian mobil bekas dan praktik ilegal penggunaan pelat nomor palsu

*Sumber : Diolah oleh peneliti, 2025*

### Faktor Faktor Penentu Ketidaktepatan Implementasi Kebijakan Ganjil Genap di Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan teori Donald Van Metter dan Carl Van Horn, yang mencakup enam indikator utama: Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Organisasi Pelaksana, Sikap Para Pelaksana, Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Kegiatan-Kegiatan, serta Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik.

## **A. Standar dan Sasaran Kebijakan**

Standar kebijakan biasanya mengacu pada ukuran yang jelas dan terukur, sementara sasaran kebijakan merujuk pada tujuan spesifik yang ingin dicapai. Sasaran ini harus selaras dengan standar yang ditetapkan, agar pelaksanaan kebijakan dapat mencapai hasil yang diinginkan.

Kebijakan ganjil genap di DKI Jakarta telah dirancang dengan standar dan sasaran yang jelas untuk mengatasi masalah lalu lintas dan polusi udara. Sasaran kebijakan, yang berfokus pada pengurangan penggunaan kendaraan pribadi dan peningkatan penggunaan transportasi umum, sudah didefinisikan dengan baik. Ukuran dan tujuan Kebijakan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dengan Pihak Kepolisian sudah terlaksana secara baik dan telah sesuai dengan apa yang diperlukan oleh masyarakat di DKI Jakarta

## **B. Sumber Daya**

Sumber daya mencakup dana, waktu, tenaga kerja, dan informasi yang diperlukan untuk mengimplementasikan kebijakan. Sumber daya merupakan faktor kunci dalam keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan, terutama dalam sektor pelayanan publik.

Kebijakan ganjil genap di DKI Jakarta memiliki dukungan sumber daya yang memadai dari sisi Dinas Perhubungan dan Ditlantas, baik dalam hal anggaran, tenaga kerja, maupun fasilitas pendukung.

Meskipun Dishub dan Ditlantas memiliki anggaran yang cukup untuk pelaksanaan kebijakan ini, sedangkan DLH masih menghadapi kendala dalam membangun, mengoperasikan, dan memelihara stasiun pemantau udara akibat keterbatasan anggaran. Meskipun SDM di DLH sudah kompeten, kekurangan stasiun pemantau udara akibat kendala anggaran dapat mengurangi efisiensi pemantauan dan evaluasi kualitas udara di ruas jalan yang terdampak kebijakan.

## **C. Karakteristik Organisasi dan Pelaksana**

Karakteristik organisasi dan pelaksana mencakup struktur, budaya, dan kapabilitas dari organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan. Karakteristik organisasi dan pelaksana dalam kebijakan pembatasan lalu lintas ganjil genap di DKI Jakarta sangat berpengaruh pada keberhasilan implementasinya.

Karakteristik organisasi dan pelaksana kebijakan ganjil genap di DKI Jakarta menunjukkan kesiapan yang cukup baik pada Dishub, Ditlantas Dan DLH. Struktur organisasi yang jelas, tenaga ahli yang kompeten, dan teknologi pendukung menjadi keunggulan ketiga instansi tersebut.

## **D. Sikap Para Pelaksana**

Sikap Para Pelaksana merujuk pada bagaimana para pelaksana kebijakan merespons dan menindaklanjuti

pelaksanaan suatu kebijakan. Sikap para pelaksana kebijakan ganjil genap di DKI Jakarta, yaitu Dinas Perhubungan (Dishub) dan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, sangat mendukung keberhasilan kebijakan ini.

Komitmen yang tinggi dari Dinas Perhubungan (Dishub), Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya (Ditlantas), dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terlihat dari upaya mereka untuk merencanakan, mengawasi, dan menegakkan kebijakan secara konsisten dan penuh dedikasi. Kesediaan mereka untuk bekerja ekstra dan menghadapi tantangan, baik dalam penyediaan fasilitas, penegakan aturan, maupun pemantauan kualitas udara, menunjukkan kesiapan mereka untuk memastikan kebijakan berjalan dengan efektif. Kompetensi yang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan ini juga sangat mendukung pelaksanaan kebijakan, dengan adanya tenaga ahli yang kompeten, penggunaan teknologi yang tepat, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan kebutuhan kebijakan.

#### **E. Komunikasi antarorganisasi terkait dan kegiatan-kegiatan**

Komunikasi antarorganisasi terkait dan kegiatan-kegiatan adalah proses di mana berbagai organisasi yang terlibat dalam implementasi kebijakan saling berkomunikasi dan berkoordinasi untuk

memastikan kelancaran pelaksanaan kebijakan tersebut.

Dishub, Ditlantas, dan DLH memiliki peran yang saling melengkapi dalam pertukaran informasi untuk mendukung kebijakan ganjil genap. Dishub menyediakan data lalu lintas dan infrastruktur, Ditlantas memberikan laporan pelanggaran dan penegakan aturan, sementara DLH fokus pada data kualitas udara. Ketiganya menghadapi tantangan masing-masing, namun komitmen untuk berbagi data secara rutin memungkinkan kebijakan ini berjalan lebih efektif dan efisien.

#### **F. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik**

Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik adalah keseluruhan kondisi yang mencakup aspek hubungan masyarakat (sosial), aktivitas dan distribusi sumber daya (ekonomi), serta kebijakan dan struktur pemerintahan (politik) yang memengaruhi dan dipengaruhi oleh implementasi suatu kebijakan.

Dari segi ekonomi, kebijakan ini membawa dampak yang beragam, di mana di satu sisi dapat meningkatkan efisiensi mobilitas dan produktivitas, namun di sisi lain membebani pelaku usaha dan sektor logistik akibat meningkatnya biaya

operasional. Oleh karena itu, perlu adanya keseimbangan dalam regulasi agar tujuan pengurangan kemacetan dan polusi udara tidak menghambat pertumbuhan ekonomi. Secara sosial, dukungan dan partisipasi masyarakat sangat menentukan efektivitas kebijakan ini. Pemahaman masyarakat terhadap manfaat kebijakan akan meningkatkan kepatuhan, tetapi kebijakan ini juga harus dievaluasi secara berkala agar tidak menimbulkan efek samping seperti perpindahan kemacetan ke ruas jalan lain. Dukungan dari pemerintah dan pemangku kepentingan politik yang stabil akan memastikan keberlanjutan kebijakan tanpa perubahan yang membingungkan masyarakat. Namun, keberlanjutan kebijakan ini sering kali diperdebatkan, terutama ketika ada kelompok yang merasa dirugikan, baik dari segi kebebasan mobilitas maupun dampaknya terhadap ekonomi.

**Tabel 4 Analisis Faktor Penentu Ketidaktepatan Kebijakan Ganjil Genap**

No	Faktor Penentu Ketidaktepatan Kebijakan	Pendukung/Penghambat	Keterangan
1	Standar dan Sasaran Kebijakan	Pendukung	Standar dan sasaran kebijakan sudah didefinisikan dengan baik
2	Sumber Daya	Penghambat	Kurangnya anggaran untuk tambahan stasiun pemantau udara.
3	Karakteristik Organisasi dan Pelaksanaan	Pendukung	Karakteristik organisasi dan pelaksana sudah menunjukkan kesiapan yang baik
4	Ekip Para Pelaksana	Pendukung	Komitmen dan kesiapan para pelaksana sudah baik
5	Komunikasi antarorganisasi terkait dengan Kegiatan-kegiatan	Pendukung	Komunikasi antarorganisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan berjalan baik.
6	Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik	Penghambat	Ekonomi... Pendapatannya pelaku usaha dan logistik menurun akibat akses terbatas. Sosial : Kurangnya kepatuhan masyarakat. Politik : Pro dan kontra di masyarakat, sebagian mendukung untuk mengurangi kemacetan, sebagian merasa dirugikan

*Sumber : Diolah oleh peneliti, 2025*

## KESIMPULAN

### **Ketepatan Kebijakan Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil Genap di Provinsi DKI Jakarta**

**Tepat Kebijakan**, pada aspek ini dalam Kebijakan Ganjil Genap di DKI Jakarta, Kebijakan ini relevan dengan situasi lalu lintas Jakarta dan sudah terdefinisi dengan jelas. Selain itu, pemerintah mendorong penggunaan transportasi umum ramah lingkungan serta mengembangkan infrastruktur pendukung seperti jalur sepeda dan fasilitas pejalan kaki, menjadikannya kebijakan yang tepat.

**Tepat pelaksana**, pada aspek ini koordinasi yang terjalin antara Dishub DKI Jakarta, Ditlantas Polda Metro Jaya, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Koordinasi ini mencakup pengawasan terhadap seluruh pihak yang terlibat dan pemantauan kualitas udara oleh DLH untuk menilai dampak kebijakan terhadap lingkungan. Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan tepat pelaksana.

**Tepat Proses**, pada aspek ini dalam implementasi kebijakan ganjil genap di DKI Jakarta telah mengikuti tahapan terstruktur, termasuk perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan, dan evaluasi. Meskipun

prosedur berjalan baik, menurunnya kepatuhan masyarakat menghambat efektivitas kebijakan dalam jangka panjang, sehingga hasilnya belum sepenuhnya optimal.

**Tepat Lingkungan**, pada aspek ini dalam Kebijakan ganjil-genap di DKI Jakarta masih belum sepenuhnya memenuhi prinsip tepat lingkungan karena meskipun mendapat dukungan politik yang kuat dan didukung dengan infrastruktur transportasi yang semakin berkembang, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan masih rendah. Faktor sosial, seperti kurangnya kesadaran akan pentingnya kebijakan ini serta keterbatasan alternatif transportasi bagi sebagian warga, menjadi tantangan utama dalam implementasi yang efektif.

**Tepat Target**, pada aspek ini dalam Kebijakan ganjil genap di DKI Jakarta belum sepenuhnya tepat target karena meskipun menasar pengguna kendaraan pribadi roda empat sebagai kontributor utama kemacetan dan polusi. Alih-alih mengurangi volume kendaraan secara signifikan, kebijakan ini justru mendorong

masyarakat mencari alternatif seperti membeli mobil dengan pelat nomor berbeda atau bahkan menggunakan pelat palsu, yang pada akhirnya melemahkan tujuan awal kebijakan.

### **Faktor Penentu Ketidaktepatan Implementasi Kebijakan Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil Genap di Provinsi DKI Jakarta**

Pertama, Sasaran kebijakan, yang berfokus pada pengurangan penggunaan kendaraan pribadi dan peningkatan penggunaan transportasi umum, sudah didefinisikan dengan baik.

Kedua, Dishub dan Ditlantas memiliki sumber daya yang memadai, namun DLH menghadapi kendala anggaran dalam pemantauan kualitas udara. Keterbatasan stasiun pemantau udara menghambat evaluasi efektivitas kebijakan.

Ketiga, Karakteristik organisasi dan pelaksana kebijakan ganjil-genap di DKI Jakarta menunjukkan kesiapan yang baik, terutama pada Dishub, Ditlantas, dan DLH. Ketiga instansi ini memiliki struktur yang terorganisir, tenaga ahli yang berkompeten, serta dukungan teknologi yang memadai sebagai keunggulan dalam pelaksanaan kebijakan.

Keempat, Sikap para pelaksana kebijakan ganjil genap di DKI Jakarta sangat mendukung keberhasilan implementasi. Komitmen tinggi dari Dishub, Ditlantas, dan DLH terlihat dari upaya mereka dalam perencanaan, pengawasan, dan penegakan aturan. Kesiapan mereka untuk menghadapi tantangan serta kompetensi yang dimiliki, termasuk tenaga ahli dan teknologi yang tepat, memastikan kebijakan berjalan efektif.

Kelima, Komunikasi antarorganisasi terkait dan koordinasi kegiatan antara Dishub, Ditlantas, dan DLH berjalan dengan baik. Mereka bekerja dengan penuh dedikasi dan profesionalisme, memastikan setiap tahap implementasi kebijakan terkoordinasi dengan optimal. Selain itu, monitoring dan evaluasi dilakukan secara efektif untuk menjamin kebijakan ganjil genap dapat berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

Keenam, Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik, Dari segi ekonomi, kebijakan ganjil genap berdampak pada penurunan pendapatan pelaku usaha dan

logistik akibat akses yang terbatas, terutama bagi sektor yang bergantung pada mobilitas tinggi. Secara sosial, masih terdapat tantangan dalam kepatuhan masyarakat, di mana beberapa pengendara mencari cara untuk menghindari aturan, sehingga mengurangi efektivitas kebijakan. Sementara itu, dari sisi politik, kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Sebagian mendukung karena dapat mengurangi kemacetan dan polusi udara, namun sebagian lainnya merasa dirugikan karena keterbatasan mobilitas dan dampaknya terhadap ekonomi.

## **SARAN**

Berdasarkan hasil temuan di lapangan masih terdapat kendala dalam penelitian ini, berikut merupakan beberapa rekomendasi yang dapat peneliti sampaikan:

1. Kebijakan dinyatakan belum tepat kebijakan dan tepat lingkungan karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan. Oleh karena itu, pemerintah terutama Dinas Perhubungan dan Ditlantas Polda Metrojaya perlu memperluas penerapan tilang elektronik (ETLE) untuk

- meningkatkan pengawasan dan kepatuhan masyarakat.
2. Dari aspek tepat target, kebijakan ganjil genap belum tepat target dikarenakan muncul praktik ilegal seperti penggunaan pelat nomor palsu semakin memperumit permasalahan. Untuk mengatasi hal ini, pihak Ditlantas Polda Metrojaya dan Dinas Perhubungan perlu memperketat pengawasan melalui operasi razia kendaraan secara berkala guna menindak tegas pelanggaran tersebut serta menerapkan sanksi yang lebih berat bagi pelanggar.
  3. Kebijakan ganjil genap justru mendorong masyarakat untuk membeli mobil bekas sebagai solusi agar tetap dapat beraktivitas tanpa terhalang aturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum sepenuhnya efektif dalam mengurangi jumlah kendaraan pribadi di jalan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas serta aksesibilitas transportasi umum harus menjadi prioritas utama pemerintah. Dengan adanya transportasi umum yang nyaman, terjangkau, dan efisien, masyarakat akan memiliki alternatif yang lebih baik dibandingkan harus membeli kendaraan tambahan, sehingga tujuan utama kebijakan ini dalam mengurangi kemacetan dapat tercapai tanpa menimbulkan dampak negatif lainnya.
  4. Dari sisi sumber daya, pemantauan kualitas udara masih terkendala keterbatasan anggaran dan jumlah stasiun pemantauan. Hal ini dapat diatasi dengan penambahan anggaran untuk stasiun pemantau udara
  5. Dari sisi lingkungan ekonomi, pendapatan pelaku usaha dan logistik menurun akibat akses terbatas. Untuk mengurangi dampak negatif ini, pemerintah dapat memberikan insentif atau subsidi bagi usaha kecil dan sektor logistik yang terdampak. Selain itu, fleksibilitas jam operasional bagi kendaraan niaga perlu diterapkan agar aktivitas bisnis tetap berjalan tanpa terganggu kebijakan pembatasan kendaraan.
  6. Dari aspek lingkungan sosial dan politik, kebijakan ini masih menimbulkan pro dan kontra di masyarakat terkait aksesibilitas,

efisiensi transportasi umum, dan dampak ekonomi. Untuk meningkatkan dukungan publik, pemerintah perlu memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui forum diskusi atau survei kepuasan. Sosialisasi yang lebih interaktif berbasis komunitas juga diperlukan agar masyarakat lebih memahami manfaat kebijakan ini

## DAFTAR PUSTAKA

- Andre Alparis Hasiholan. (2022). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBATAAN LALU LINTAS DENGAN SISTEM GANJIL GENAP DI PROVINSI DKI JAKARTA*.
- Aman., dkk. (2022). Pengoptimuman Biaya Distribusi Menggunakan Integer Programming dalam Menyikapi Kebijakan Ganjil-Genap di Jakarta. *Jurnal MILANG*, 18 (1), 63-65.
- Ambarini, Hanifa Putri., dkk. (2024). Analisis Model Pengambilan Keputusan Dalam Implementasi Kebijakan Ganjil Genap Di Jakarta Guna Mengurangi Kemacetan Dilihat Dari Teori Rasionalitas. *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(2), 496-498.
- Adinatha, Inigo Kila., dkk. (2022). Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca Berdasarkan Penggunaan Lahan di Kota Bogor. *Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan*, 7(1), 50-52.
- Ariska, Dwi Suci., dkk. (2019). Analisis Sentimen Tentang Kebijakan Ganjil Genap Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta Pada Twitter Menggunakan BM25 dan K-Nearest Neighbor. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*. 3(3), 2626-2628.
- Bayanillah, Qori'atul Aulia., dkk. (2023). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Lalu Lintas di Cibiru Kota Bandung. *Jurnal Gunung Djati Conference Series*, 27 (1), 42-44.
- Bernadet., dkk. (2023). Pengaruh Kebijakan Pencemaran Udara Transportasi terhadap Nilai Indeks Kualitas Udara di DKI Jakarta. *Journal of Environmental Education and Sustainable*, 24(1), 3-5.
- Heliany, Ina., dkk. (2020), Efektifitas Kebijakan Publik Terkait Dengan Peraturan Pelat Kendaraan Ganjil-Genap (Studi Kasus Tol Bekasi Jakarta). *Jurnal Penelitian Hukum*, 2(1), 264-267.
- Kusumah, Dewi., dkk. (2022). Implementasi Kebijakan Penanganan Kemacetan di Kota Cirebon (Studi Kasus di Jalan Pekiringan). *Jurnal Ilmiah Publika*. 10 (2), 32324.
- Lahu, Paskhalis Enggar., dkk. (2023). *Regulatory Impact Analysis (Ria) Of Odd-Even Rules For The Special Capital Region (DKI) Jakarta*. *Liberal Arts Journal*, 2(1), 62-65.
- Lestari, Diah., dkk. (2021). Implikasi Sosiologis Penerapn Ganjil Genap Lalu Lintas dalam Masa Covid terhadap Kesejahteraan Rakyat. *Jurnal Hermeneutika*, 5 (2), 256-258.
- Lahu, E. P., & Mumbunan, M. T. (2023). *Regulatory Impact Analysis (Ria) Aturan Ganjil-Genap Daerah Khusus Ibukota (Dki) Jakarta*. *TRI PANJI, Liberal Arts Journal*, 2(1), 62-74. <https://jurnal-tripanja.id/tripanja/article/view/14>
- Mulyani, T., Ashari, Y., & Pratiwi, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pemerintah Atas Perluasan Ganjil



- Genap Terhadap Aktivitas Logistik di Wilayah DKI Jakarta The Implementation of Government Policies on Odd-Even Policy Expansion towards Logistics Activities in DKI Jakarta. *Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi Dan Logistik*, 6(3), 213–224.
- Musqith, Munadhil Abdul; Tayibnapis, R. G. (2022). Kajian Yuridis Efek Kebijakan Ganjil Genap. *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 9(4), 1307–1318.  
<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i4.21716>
- Nugroho, sbm. 2018. Analisis Prioritas Kebijakan Penanganan Kemacetan Jalan Raya Serpong Tangerang Selatan. *Media Ekonomi dan Manajemen*. Vol 33, (2), 164-174
- Perwitasari, Erni Pratiwi. (2021). Dampak Kebijakan Perluasan Ganjil Genap Terhadap Jumlah Penumpang dan Pendapatan Transjakarta. *Jurnal manajemen Transportasi*, 8(1), 51-53.
- Putra, Syah Arman. (2019). Smart City : Ganjil Genap Solusi Atau Masalah Di DKI Jakarta. *Jurnal IKRA-ITH Informatika*, 3(3), 70-72
- Putri, Ari Ananda., dkk. (2021). Simulasi Dampak Rencana Penerapan Skema Ganjil Genap Di Kota Bekasi. *Jurnal Teknologi Transportasi dan Logistik*, 2 (2), 155-156.
- Putro, Wisnu Dwihutomo., dkk. (2024). Kerugian Masyarakat Akibat Pembatasan Lalu Lintas Dengan Sistem Ganjil Genap. *Ensiklopedia of Journal*, 6 (2), 321-323
- Rahadian, Akhmad Hidayat. (2022). Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Ganjil Genap Dalam Mengatasi Kemacetan Di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Reformasi Administrasi*, 9 (1), 50-51.
- Saly, Neltje Jeane., dkk. (2023). Kebijakan Pemerintah Dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. *Jurnal Kwarganegaraan*, 7 (2), 1642-1644.
- Setyowati, Tri Mulyani., dkk. (2020). Implementasi Kebijakan Pemerintah Atas Perluasan Ganjil Genap Terhadap Aktivitas Logistik di Wilayah DKI Jakarta. *Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi dan Logistik (JMBTL)*, 6 (3), 213-215.
- Sugiono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Cetakan Kedua enam. Bandung: Alfabeta
- REGULASI :
- Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Kualitas Udara.
- Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2016 Tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil Genap.
- Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 155 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil Genap.
- Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2019 Tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil genap.